

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang *familier* digunakan dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi menjadi target utama dalam pembangunan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003:21). Dengan terjadinya Pertumbuhan ekonomi tentu akan berimplikasi terhadap semua sektor yang mempengaruhinya, diantaranya tingkat kemiskinan, tenaga kerja dan Kemandirian Daerah sebagai ukuran desentralisasi fiskal,

berupa rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi, kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan.

Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Tabel 1. Dibawah ini menunjukkan jumlah penduduk miskin yang berada di Eks-Karesidenan Surakarta dari tahun 2006-2010, terdiri dari enam Kabupaten dan satu Kota, tren yang muncul adalah terjadinya fluktuasi dalam jumlah kemiskinan, idealnya, setiap tahun harusnya

kemiskinan semakin berkurang, akan tetapi fenomena di Eks-Karesidenan mengalami tren yang variatif. Menurut hasil penelitian Sasana (2009) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah”. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sehingga sudah menjadi kewajiban suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, sehingga dengan tumbuhnya perekonomian suatu daerah maka kemiskinan akan bisa diminimalisir.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk miskin di eks-karesidenan Surakarta 2006-2010 ( 000 Orang )

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Tahun</b>				
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Surakarta</b>	77,6	69,8	83,4	78	69,8
<b>Karanganyar</b>	148,6	138,9	125,9	118,8	113,8
<b>Wonogiri</b>	262,9	237,4	201,1	184,9	145,5
<b>Boyolali</b>	184,6	167	158,4	148,2	127,8
<b>Sukoharjo</b>	126,5	113,8	99,1	94,4	90,2
<b>Sragen</b>	201,9	180,7	177,1	167,3	149,7
<b>Klaten</b>	257,4	249,1	243,1	220,2	197,4

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2010

Selain kemiskinan, fenomena yang sering muncul khususnya di Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi seperti di Indonesia adalah antusias yang tinggi dari masyarakat untuk menjadi tenaga kerja terserap, dengan semakin banyaknya tenaga kerja terserap maka pertumbuhan perekonomian di Negara atau Daerah tersebut mengalami peningkatan. Senada dengan hasil temuan Sasana (2009) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tenaga kerja

terserap. Hasil studi ini mendukung teori Harrod- Domar (1946) dalam Subri (2002:8), menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas produksi yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang lebih besar pula, surplus akan muncul diikuti oleh penurunan jumlah produksi. Peranan modal fisik dalam model pertumbuhan amat besar. Tetapi kapasitas hanya dapat meningkat bila sumber daya lain membesar. Disamping itu dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan modal fisiknya meningkat.

Tabel 1.2 Dibawah ini memperlihatkan kepada kita tentang jumlah angkatan kerja di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2006-2008 dan 2010. Tren setiap tahun mengalami fluktuasi angkatan kerja di setiap Kabupaten/Kota. Apabila seluruh jumlah angkatan kerja tersebut dapat terserap, maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut mengalami peningkatan.

Tabel 1.2 Jumlah Angkatan Kerja di eks-karesidenan Surakarta  
2006-2009 dan 2010

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2006	2007	2008	2010
<b>Surakarta</b>	258420	287450	277675	258573
<b>Karanganyar</b>	426324	465240	451144	457756
<b>Wonogiri</b>	546542	568927	557492	519702
<b>Boyolali</b>	532346	572381	536845	527581
<b>Sukoharjo</b>	447876	471155	447875	432526
<b>Sragen</b>	456150	504199	476316	483526
<b>Klaten</b>	606790	636135	612644	574549

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2010

Desentralisasi fiskal dapat dipakai untuk mengukur tingkat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level lokal karena memberikan pertimbangan politikus lokal dan birokrat yang dapat di akses dan peka terhadap kelompok bunga lokal. (Oates : 1993)

Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika

pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

Bahl (2000:25-26) mengemukakan dalam aturan yang kedua belas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang. Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain. Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal.

Karesidenan Surakarta merupakan daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari enam Kabupaten dan Satu Kota, yaitu Kabupaten Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Sragen dan Kota Surakarta.

Tabel 1.3. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2010

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
<b>Surakarta</b>	0 - 75 thn	243,296	256,041	499,337
<b>Sragen</b>	0 - 75 thn	421,363	436,903	858,266
<b>Karanganyar</b>	0 - 75 thn	402,964	410,232	813,196
<b>Wonogiri</b>	0 - 75 thn	452,386	476,518	928,904
<b>Sukoharjo</b>	0 - 75 thn	409,174	415,064	824,238
<b>Klaten</b>	0 - 75 thn	555,7	574,347	1,130,047
<b>Boyolali</b>	0 - 75 thn	459,044	471,487	930,531
<b>Total</b>	0 - 75 thn	2943,927	3040,592	4854,472

BPS, Jawa Tengah dalam angka 2010

Tabel 1.4. Pembagian Wilayah Administrasi Menurut  
Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta 2010

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Total Kelurahan + Desa
<b>Surakarta</b>	5	-	51	51
<b>Sragen</b>	20	196	12	208
<b>Karanganyar</b>	17	162	15	177
<b>Wonogiri</b>	25	251	43	294
<b>Sukoharjo</b>	12	150	17	167
<b>Klaten</b>	26	391	10	401
<b>Boyolali</b>	19	263	4	267

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2010

Berdasarkan latar belakang diatas, fenomena kemiskinan, tenaga kerja dan desentralisasi fiskal yang mengalami tren fluktuasi setiap tahunnya, dikira perlu penulis ingin mengatehui sejauh mana pengaruh ketiganya terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Eks-Karisidenan Surakarta tahun 2006-2010. Sehingga penulis mengambil judul penelitian

**“ ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, TENAGA KERJA DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP**

**PERTUMBUHAN EKONOMI DI EKS-KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2006-2010** ". Penelitian ini akan menggunakan data panel, yaitu penggabungan antara *time series* dan *cross section*.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas sehingga rumusan masalah yang dapat dibuat adalah :

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Eks-Karesidenan Surakarta?
2. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Eks-Karesidenan Surakarta?
3. Bagaimana pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Eks-Karesidenan Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks-Karesidenan Surakarta.
2. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks-Karesidenan Surakarta.
3. Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks-Karesidenan Surakarta.



#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan tentang Pertumbuhan Ekonomi dan pengaruh-pengaruhnya terhadap kemiskinan, tenaga kerja dan desentralisasi fiskal, khususnya di Eks-Karesidenan Surakarta.
2. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini sebagai referensi pemerintah dalam membuat kebijakan, menganalisis masalah dan mencari format solusi terbaik untuk pertumbuhan ekonomi di Eks-Karesidenan Surakarta.
3. Bagi Masyarakat, mahasiswa dan peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi tambahan informasi dan rujukan.

#### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab, yang terdiri dari :  
BAB 1 Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III Metode Penelitian, BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, BAB V Penutup.

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah kemudian dijadikan Rumusan Masalah berupa pertanyaan penelitian. Dari Rumusan Masalah tersebut kemudian dikemukakan Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian. Di bagian akhir di buat sistematika penulisan skripsi.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang macam Variabel Bebas, Variabel Terikat, Teori pendukung, penelitian terdahulu, Subyek Penelitian kemudian hubungan antar Variabel, kerangka teoritis dan terakhir Pengembangan Hipotesa.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga dijelaskan mengenai definisi operasional yang mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel-variabel dalam penelitian, baik berupa data primer maupun sekunder. Metode analisis mendeskripsikan jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

## BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan mengenai hasil analisis dari objek penelitian.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir, bab yang menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan, serta saran.